

5 Juni Ada Uji Emisi di Tangerang Raya, Berikut Jadwal dan Lokasinya

TANGERANG (IM) - Uji emisi akbar akan digelar Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di sembilan titik se-Jabodetabek pada 5 Juni 2023.

Khusus di wilayah Tangerang Raya, pelaksanaan uji emisi akan dilakukan selama dua sesi. Yaitu pukul 08.00-12.00 WIB dan pukul 12.00 - 15.00 WIB.

Informasi yang dihimpun, pelaksanaan uji emisi akan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tangerang Tigaraksa, Puspem Kota Kota Tangerang, dan Terminal BSD untuk daerah Tangsel.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Tihar Sopian mengatakan, program yang digagas dari Kementerian LHK ini menyediakan kuota

75 kendaraan per kota / kabupaten untuk dilakukan pengujian emisi.

Tihar mengatakan, dalam pengujian emisi akbar kali ini pemilik kendaraan wajib memasukkan data nomor rangka dan mesin kendaraan pada melakukan pendaftaran di website <https://ppkl.link/Uji-Emisi-Akbar-2023>

“Yang membedakan saat ini adalah memasukkan data berupa nomor rangka dan nomor mesin,” ujarnya kemarin.

Tihar mengatakan, kendaraan yang wajib melakukan uji emisi adalah yang berasal dari Kota Tangerang. Namun, tidak menutup kemungkinan kendaraan luar kota dapat melakukan uji emisi di Kota Tangerang.

“Kendaraan yang wajib melakukan uji emisi adalah yang di bawah tahun 2020,” pungkasnya. ● pp

Stasiun Pemantau Gunung Sinabung Terbakar Akibat Kebakaran Lahan

MEDAN (IM) - Alat pemantau aktivitas Gunung Sinabung di Desa Sigarang Garang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terbakar. Alat yang terbakar merupakan stasiun seismik dan stasiun deformasi, yang berfungsi untuk memantau aktivitas gunung api dan gerakan lempeng di sekitar lokasi Gunung Sinabung.

Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra mengatakan awalnya mereka mendapati stasiun tersebut tidak mengirimkan data ke pos pengamatan pada Rabu (31/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Tim kemudian melakukan pengecekan ke lokasi hari ini. Setelah melakukan pengecekan ke lokasi, tim mendapati alat pemantau terbakar. Lahan di sekitar stasiun tersebut juga ditemukan terbakar.

“Ternyata kami dapat lahan itu terbakar dan termasuk alat (boks dan tower kecil) kita terbakar, jadi lahan itu yang terbakar jadi alat yang ada di situ ikut terbakar,” kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra,

Jumat (2/6).

Stasiun yang terbakar tersebut merupakan satu dari sekian stasiun pemantau Gunung Sinabung yang dimiliki oleh pos pemantauan. Sehingga mereka masih memperoleh data aktivitas Gunung Sinabung dari stasiun yang lain. Armen menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi untuk dilakukan pergantian alat yang terbakar tersebut. Namun butuh waktu karena alat tersebut tidak diperjualbelikan.

Mereka menduga lahan tersebut sengaja dibakar sehingga alat pemantau Gunung Sinabung juga ikut terbakar. Armen mengimbau agar warga ikut menjaga alat pemantau yang berada di beberapa stasiun sehingga dapat diketahui aktivitas Gunung Sinabung ke depannya.

“Iya bisa jadi kemungkinan gitu (lahan sengaja dibakar untuk buka lahan), harapan kami peralatan yang ada di sekitar Gunung Sinabung mari kita sama-sama jaga karena itu untuk memberikan kita informasi yang dimana terkait juga dengan keselamatan kita,” tuturnya. ● pra



PROSESI PENGAMBILAN API DHARMA WAISAK

Sejumlah perwakilan umat Buddha mengambil Api Dharma Waisak menggunakan obor dari sumber Api Abadi Mrapen, Desa Manggarmas, Godong, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (2/6). Prosesi pengambilan api bagian dari rangkaian ritual Jelang Hari Raya Waisak itu diikuti para Bikkhu dan perwakilan majelis umat Buddha, kemudian api disemayamkan di Candi Mendut dan dibawa bersama air dari Umbul Jumprit menuju altar utama di Candi Borobudur pada puncak prosesi Hari Raya Waisak 2567 BE/2023.

Kab. Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pilkades Kabupaten Tangerang 2023 memiliki beberapa tahapan dan telah terjadwal. Total ada 5 tahapan yang wajib dilaksanakan. Mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan diakhiri pembubaran panitia, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Yayat Rohiman.

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 16 Desa akan digelar pada 24 September 2023. Pilkades yang menelan anggaran Rp 6,6 miliar itu dilaksanakan di 13 kecamatan.

“Tahapan persiapan akan digelar pada 1 Juni dan pelaksanaannya pada 24 September mendatang,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Yayat Rohiman, Jumat (2/6).

Yayat menerangkan, dari 16 desa yang menggelar pemilihan, dua desa akan melakukan pemilihan kepala desa antarwaktu (PAW). Menurut Yayat, dua desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa antarwaktu itu adalah Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi dan Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga.

Pergantian antar waktu itu dilakukan karena kepala desa

yang bersangkutan mengundurkan diri. “Keduanya mundur karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024,” ucap Yayat.

Menurut Yayat, sesuai dengan surat edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.3.5.5/244/SJ, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang diperbolehkan untuk dilaksanakan sebelum 1 November 2023.

“Dengan memperhatikan surat edaran dari Kemendagri tersebut, dengan ini Kabupaten Tangerang akan tetap melaksanakan Pilkades Serentak tahun 2023 mendatang karena memang tidak bersinggungan secara langsung dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Pilkades Kabupaten Tangerang 2023 memiliki beberapa tahapan dan telah terjadwal. Total ada 5 tahapan yang wajib dilaksanakan.

Demi Balik Modal Uang Kampanye, Kades di Pacitan Korupsi Dana Desa

PACITAN (IM) - Biaya kampanye yang tinggi untuk menjadi kepala desa, membuat Edi Suwito mengkorupsi alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Saat ini, Mantan Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Edi pun ditahan dan sudah diadukan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan.

Kejari Pacitan pun menyerahkan Edi atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan APBDes tahun 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum diserahkan, Edi sempat menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Pacitan.

Tersangka terjerat tindak pidana korupsi senilai Rp 516 juta lebih karena beberapa item pekerjaan yang bersumber ADD maupun DD yang semula dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, sengaja tak digarap hingga lewat tahun anggaran.

Hal itu ia lakukan untuk mengembalikan dana kampanye saat ia maju sebagai kepala desa. “Dana yang disewelengkan itu Rp 516 juta. Untuk kepentingan pribadi. Mengembalikan dana kampanye yang terlanjur keluar ketika tersangka mencalonkan

diri sebagai Kades,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pacitan Ratno Timur Pasaribu, Jumat (2/6).

Setelah dilakukan penyelidikan dari penyidik ke JPU, dia mengatakan bahwa selanjutnya pihaknya tinggal melakukan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Surabaya. “Dalam waktu dekat kita akan melimpahkan berkas perkara untuk diajukan dipersidangan,” katanya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 31 tipikor dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara.

“Meski nanti sudah diputus hukuman, bukan berarti tersangka bebas dari kewajibannya untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 516 juta,” pungkas Ratno.

Saat dilakukan pelimpahan, Edi Suwito terlihat menggunakan baju tahanan berwarna orange. Dia juga menggunakan alat bantu jalan berupa tongkat. ● pra

Mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan diakhiri pembubaran panitia.

“Kami lakukan persiapan mulai dari pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan Kabupaten, sosialisasi pemilihan kepala desa dan pembentukan panitia pilkades, pengawas, penyusunan rencana biaya pilkades dan persetujuan biaya pilkades,” kata Yayat.

Adapun tahapan Pilkades serentak dimulai dari tahapan pencalonan yaitu pendaftaran dan pengumuman bakal calon Kades yang dilanjutkan seleksi bakal calon kepala desa yang meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi faktual, test tertulis

kemampuan dasar, dan pengumuman nama calon.

Tahap berikutnya penetapan calon kepala desa dan penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon kepala desa selama 3 hari dan masa tenang dalam selama 3 hari.

Selanjutnya, pemungutan suara yang diawali dengan penyerahan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPS Pilkades.

Usai pencoblosan, ada tahapan penghitungan suara, pleno rekapitulasi penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih.

Kemudian, penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih dan menyampaikan laporan kepada bupati berupa usulan pengesahan dan pe-

lantikan.

Tahapan terakhir, Bupati Tangerang menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih serta melantik kepala desa terpilih.

“Semuanya wajib dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ucap yayat.

Yayat menambahkan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024. “Saya meminta masyarakat menjaga kondusivitas selama pilkades. Sebab, pelaksanaan pilkades serentak ini akan menjadi tolok ukur keamanan saat pemilu nanti,” ujarnya. ● pp

Atasi Krisis Air Bersih, BPBD Lebak Siapkan Tiga Mobil Tangki Air Bersih

LEBAK (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menyiagakan tiga mobil tangki air bersih. Mobil tangki berkapasitas 6 ribu liter itu untuk membantu warga yang mengalami kekeringan yang berujung pada krisis air bersih.

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika (BMKG), kemarau akan terjadi Mei hingga Oktober 2023 mendatang akibat dampak El Nino.

“Untuk kesiapsiagaan di musim kemarau ini, kami sudah berkoordinasi dengan jajaran PDAM Lebak untuk memberikan dukungan air bersih di seluruh wilayah Lebak. Sehingga memudahkan petugas dalam distribusi air bersih kepada masyarakat. Kami menyiagakan tiga unit mobil tangki air kapasitas masing-masing enam ribu liter, dan satu mobil tangki air milik PDAM,”

kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Feby Rizky Pratama, Jumat (2/6).

Dia mengatakan, meskipun saat ini wilayah Kabupaten Lebak telah memasuki peralihan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau, namun pihaknya belum mendapat laporan adanya wilayah yang mengalami krisis air bersih.

“Prediksi kekeringan di Lebak puncaknya diperkirakan bulan Agustus. BMKG sendiri sudah memberikan peringatan tentang musim kemarau tahun ini lebih kering dari tiga dekade sebelumnya. Sampai saat ini kami belum menerima laporan kekeringan (gagal panen pada sawah, krisis air bersih masyarakat, kebakaran areal hutan/kebun),” ujarnya.

Dalam kondisi peralihan di mana hujan masih turun seperti sekarang ini, kata Feby, pihaknya juga mengimbau kepada para relawan yang ada di keca-

matan, pemilik embung, danau, kolam retensi, sumur buatan, dan reservoir agar segera menjaga ketersediaan air.

“Selain menunggu laporan soal kekeringan yang berpotensi timbulnya krisis air bersih kami juga terus memonitor langsung,” katanya.

Pembak Lebak telah menginventarisir daerah rawan kekeringan. Terdapat delapan Kecamatan berpotensi rawan kekeringan dari 16 Kecamatan daerah rawan bencana kekeringan di daerah yang dipimpin Bupati Iti Octavia Jayabaya ini.

Kedelapan Kecamatan yang berpotensi kekeringan menyebabkan krisis air bersih yaitu Cimarga, Warunggunung, Sajira, Maja, Cirinten, Cilograng, Leuwidamar, dan Wanasalam. ● pra



PERLINDUNGAN KAWASAN MANGROVE DI TANJUNG JABUNG BARAT Beberapa ekor monyet bertengger di dahan kayu kawasan hutan mangrove Pangkal Babu, Desa Tungkal 1, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumat (2/6). Hutan yang sebagian arealnya tengah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan areal edukasi penanaman mangrove di pesisir barat Jambi itu merupakan kawasan lindung bakau yang dikuatkan melalui penerbitan peraturan desa sebagai upaya pemerintah desa, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat melindungi kawasan mangrove seluas 112 hektare.



WISATA CANDI PLAOSAN DI KLATEN

Fotografer mengabadikan foto pasangan di Candi Plaosan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (2/6). Selain sebagai tujuan wisata, Candi Plaosan juga menjadi daya tarik para fotografer sebagai lokasi foto “prewedding”.

Genjot PAD, Komisi II DPRD Godok Raperda Tahura Banten di Pandeglang

SERANG (IM) - Komisi II DPRD Banten tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah alias Raperda tentang Taman Hutan Rakyat atau Tahura Banten di Kabupaten Pandeglang.

Raperda Tahura Banten merupakan inisiasi DPRD Banten. Digodok guna memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahura.

Sekertaris Komisi II DPRD Banten I, Oong Syahroni mengatakan, Raperda Tahura Banten itu menyusul kabar baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan RI yang telah memperluas kawasan Tahura. Yang tadinya hanya 1.595 hektare menjadi 8.425 hektare.

“Dengan hadirnya atau terbitnya SK (tentang perluasan Tahura) itu, maka kita perlu memayungi Tahura dalam bentuk Perda. Maka Komisi II berinisiasi bahwasannya Raperda tahun ini akan difokuskan kepada pembahasan Tahura,” kata Oong, Jumat (2/6).

Oong mengatakan, pihaknya beberapa hari yang lalu sudah memanggil Dinas

Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Banten serta stakeholder terkait.

Adapun progres Raperda ini sudah mencapai eksposé tentang kondisi terakhir Tahura dan rencana pemanfaatan berikut konservasinya. “Kita pastikan bahwa Raperda ini harus segera diselesaikan dengan cepat biar penanganan dan pemanfaatannya bisa optimal. Karena pada Tahura ini ada potensi pendapatan daerah baik itu dari sisi wisata, pendapatan dari hasil hutan bukan kayu, atau pendapatan lainnya sekaligus pemberdayaan masyarakat di lingkungan hutan,” ungkapnya.

Jika Raperda Tahura Banten ini telah disahkan, kata Oong, Pemprov Banten harus bisa memberikan perhatian lebih terhadap konservasi Tahura dengan adanya alokasi anggaran khusus.

“Kita ingin Tahura itu bukan hanya sebagai paru-paru dunia, tapi menjadi ikonnya Banten. Di sana nanti tidak hanya ada konservasi tapi ada juga tempat pelatihan, tempat pendidikan, tempat riset dan lain-lain,” pungkasnya. ● pra